

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

**BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**



Evaluasi PBT Balai



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai Besar PPMBTPH) Tahun 2023. Dokumen RKT ini sebagai salah satu dokumen dalam rangkaian penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Balai Besar PPMBTPH sebagai UPT berusaha memberikan kontribusi terhadap pencapaian program dan kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sesuai tugas dan fungsinya. Kontribusi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan dan tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar PPMBTPH dan Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan RKT tahun 2023 ini, semoga dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan kegiatan serta acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan penyusunan anggaran di lingkup Balai Besar PPMBTPH.

Depok, Oktober 2022

Kepala Balai Besar PPMBTPH,



Ir. Warjito, M.Si

NIP. 196207121989031017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
D. Ruang Lingkup	8
BAB II CAPAIAN KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN 2021	9
A. Capaian Kinerja Organisasi	9
B. Serapan Anggaran	21
BAB III RENCANA KINERJA 2023	24
A. Indikator Kinerja	24
B. Rencana Kegiatan dan Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT meliputi penetapan sasaran/uraian, indikator, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kebijakan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target).

RKT adalah dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan program dan kegiatan. RKT satuan kerja Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai Besar PPMBTPH) merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

Besar PPMBTPH periode 2020-2024. RKT satuan kerja Balai Besar PPMBTPH menjabarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja, indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja tahunan dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Penyusunan RKT merupakan salah satu dokumen dalam rangkaian penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). RKT merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional serta Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

dampak yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai di lingkungan Balai Besar PPMBTPH dalam melaksanakan kegiatannya. Dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian pelaksanaan Balai Besar PPMBTPH, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 bagi Balai Besar PPMBTPH.

Berdasarkan hal tersebut maka Balai Besar PPMBTPH dalam penyusunan RKT tahun 2023 mengacu pada Renstra tahun 2020-2024 yang telah disusun melalui perencanaan kegiatan dan anggaran berdasarkan pagu alokasi.

B. Tujuan

Penyusunan RKT Tahun 2023 dimaksudkan sebagai acuan kinerja yang akan dicapai pada tahun bersangkutan dalam rangka perwujudan pelaksanaan kinerja pembangunan Balai Besar PPMBTPH. Sedangkan tujuan penyusunan RKT adalah:

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

1. Sebagai dasar dalam penyusunan dokumen kegiatan dan anggaran pada Balai Besar PPMBTPH tahun 2023;
2. Sebagai acuan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023; dan
3. Sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2020, Balai Besar PPMBTPH merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Balai Besar PPMBTPH secara teknis dibina oleh Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur Perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.

Tugas Balai Besar PPMBTPH adalah melaksanakan pengembangan serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

Sedangkan fungsi Balai Besar PPMBTPH adalah sebagai berikut:

1. penyusunan program dan evaluasi, pemanfaatan inovasi, pengembangan pengujian mutu benih, serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
2. pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian laboratorium, sertifikasi, dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
3. pelaksanaan uji banding meliputi uji profisiensi, unjuk kerja metode, uji arbitrase dan uji acuan antar laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura;
4. pelaksanaan uji petik mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar;
5. pelaksanaan sertifikasi *International Seed Testing Association* (ISTA) untuk benih tanaman pangan dan hortikultura;
6. pelaksanaan sertifikasi perorangan, sistem mutu dan pemberian hak penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

7. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
8. penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan dan pengujian mutu benih serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura; dan
9. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar PPMBTPH.

Struktur organisasi dan tata kerja Balai Besar PPMBTPH sebagaimana pada gambar berikut:



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

Pejabat struktural adalah Kepala Balai Besar dan Kepala Bagian Umum. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan evaluasi dari pelaksanaan pengembangan pengujian mutu benih dan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan hortikultura, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Bagian umum ini mempunyai fungsi administratif dan pelayanan, berdasarkan transformasi jabatan fungsional, dalam menjalankan tugasnya Bagian Umum dibantu oleh tiga Subkoordinator, yaitu Subkoordinator Program dan Evaluasi, Subkoordinator Kepegawaian dan Tata Usaha, dan Subkoordinator Keuangan dan Perlengkapan.

Sementara Bidang Informasi dan Jaringan Laboratorium secara struktur sudah tidak ada, namun tugas dan fungsinya tetap ada dan di bawah koodinasi Koordinator Kelompok Informasi dan Jaringan Laboratorium. Tugas pokok masih sama yaitu melaksanakan penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan dan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, serta pelaksanaan kerjasama laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas

pokok tersebut Koordinator Kelompok Informasi dan Jaringan Laboratorium dibantu oleh Subkoordinator Informasi dan Dokumentasi dan Subkoordinator Jaringan Laboratorium. Kelompok Informasi dan Jaringan Laboratorium mempunyai fungsi pelayanan teknis sedangkan kelompok fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT) melakukan kegiatan teknis yang terdiri dari pengembangan metode, pengujian laboratorium, dan sertifikasi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RKT Balai Besar PPMBTPH tahun 2023 meliputi:

1. Penjabaran kegiatan yang didasarkan pada Renstra Balai Besar PPMBTPH 2020-2024;
2. Indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Balai Besar PPMBTPH;
3. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Balai Besar PPMBTPH Tahun 2023;
4. Pembiayaan kegiatan bersumber dari Rupiah Murni (RM) APBN TA 2023.

BAB II

CAPAIAN KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN 2021

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran dan indikator sasaran kegiatan (IKSK) kegiatan Balai Besar PPMBTPH tidak diturunkan langsung dari sasaran program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemanfaatan metode pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, dengan indikator sasaran kegiatan: Jumlah rekomendasi hasil pengembangan metode pengujian mutu benih;
2. Meningkatnya pengujian mutu benih yang dilaksanakan, dengan indikator sasaran kegiatan: Jumlah Laporan hasil uji (LHU) pengujian mutu benih;
3. Meningkatnya kualitas layanan dan manajemen unit kerja Lingkup Ditjen Tanaman Pangan: a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar PPMBTPH; dan b) Tingkat

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan terhadap layanan program, anggaran, evaluasi, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga Balai Besar PPMBTPH.

Dengan sasaran kegiatan tersebut, indikator kinerja Balai Besar PPMBTPH ditetapkan sebagai berikut:

1. Jumlah rekomendasi hasil pengembangan metode pengujian mutu benih dengan target 5 rekomendasi;
2. Jumlah Laporan hasil uji (LHU) pengujian mutu benih dengan target 1.000 LHU;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar PPMBTPH dengan target 3,35;
4. Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan terhadap layanan program, anggaran, evaluasi, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga Balai Besar PPMBTPH dengan target 3,20.

Dari empat indikator kinerja Balai Besar PPMBTPH tahun 2021, dua diantaranya dengan kategori capaian Sangat Berhasil (capaian diatas 100%) yaitu jumlah Laporan hasil uji (LHU) pengujian mutu benih dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar PPMBTPH. Indikator jumlah rekomendasi

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

hasil pengembangan metode pengujian mutu benih dan tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan terhadap layanan program, anggaran, evaluasi, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga Balai Besar PPMBTPH memperoleh kategori Berhasil. Pengukuran pencapaian sasaran dan evaluasi akuntabilitas kinerja pada masing-masing kegiatan sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	Jumlah rekomendasi hasil pengembangan metode pengujian mutu benih	Rekomendasi	5	5	100,00	Berhasil
2	Jumlah Laporan hasil uji (LHU) pengujian mutu benih	LHU	1000	1024	102,40	Sangat Berhasil
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar PPMBTPH	Indeks	3,35	3,72	111,04	Sangat Berhasil
4	Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan terhadap layanan program, anggaran, evaluasi, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga Balai Besar PPMBTPH	Skala Likert	3,20	3,20	100,00	Berhasil

1. Jumlah rekomendasi hasil pengembangan metode pengujian mutu benih dengan capaian 5 rekomendasi atau 100% dari target dengan kategori **Berhasil**.

Berhasilnya pencapaian target 5 rekomendasi hasil pengembangan/validasi/verifikasi metode pengujian mutu benih ini dikarenakan ke-5 metode yang dikembangkan dianggap telah valid dan dapat diterapkan dalam pengujian mutu benih. Metode yang dikembangkan juga telah memperoleh masukan dari narasumber yang berasal dari Badan Litbang Pertanian dan perguruan tinggi dalam pembahasan rencana/proposal pengembangan metode dan juga dalam pembahasan hasil serta rekomendasi yang dihasilkan.

Metode pengujian benih yang dikembangkan berpedoman pada metode yang dilaksanakan oleh *International Seed Testing Association (ISTA) Rules*, yang juga berusaha menjawab arahan pimpinan dan memperoleh masukan dari berbagai pihak termasuk BPSB di daerah sebagai pihak yang akan menggunakan metode tersebut.

Disamping itu keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yang melaksanakan pengembangan/validasi/verifikasi metode di Balai Besar PPMBTPH yang selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan lain sebagainya, dan didukung oleh peralatan

yang lengkap, dirawat dan dikalibrasi secara berkala, serta dukungan dari institusi terkait seperti yaitu lembaga akreditasi nasional maupun internasional, perguruan tinggi, dan swasta.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain: pengembangan/validasi metode; seminar pengembangan metode; keanggotaan dalam Organisasi Internasional; pembuatan buku literatur; sinkronisasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium; dan diseminasi hasil pengembangan metode peningkatan mutu benih.

Dari pelaksanaan kegiatan pengembangan metode penggunaan drone dalam pemeriksaan lapang sertifikasi benih padi dan kajian penggunaan bahan acuan dalam produksi dan pemeriksaan lapang pada kegiatan sertifikasi benih kedelai, masing-masing memberikan hasil samping berupa benih padi dan kedelai kelas Benih Pokok (BP).

Benih padi yang dihasilkan 114.545 kg yang terdiri dari 5 varietas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Benih padi hasil pengembangan metode penggunaan drone tahun 2021

No	Varietas	Volume Benih (Kg)
1	Mekongga	25.000
2	Inpari 32 HDB	25.500
3	Inpari 42 AGRITAN GSR	33.685
4	Inpari 43 AGRITAN GSR	16.170
5	Cakrabuana	14.190
Jumlah		114.545

Sementara benih kedelai yang dihasilkan sebanyak 10.180 kg yang terdiri dari 4 varietas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Benih kedelai hasil pengembangan metode sertifikasi benih kedelai tahun 2021

No	Varietas	Volume Benih (Kg)
1	Dega 1	4.000
2	Detap 1	1.500
3	Anjasmoro	3.180
4	Grobogan	1.500
Jumlah		10.180

Benih-benih yang dihasilkan ini dimanfaatkan dalam rangka mendukung penyediaan benih padi dan kedelai bagi penangkar dan/atau kelompok tani sebagai upaya meningkatkan penggunaan benih bermutu dan bersertifikat di tingkat petani.

2. Jumlah Laporan hasil uji (LHU) pengujian mutu benih dengan capaian 1.024 LHU atau 102,40% dari target 1.000 LHU, dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Berhasilnya pencapaian indikator LHU ini dibandingkan target tahun 2021 karena didukung oleh tugas pokok dan fungsi Balai Besar PPMBTPH, yang antara lain melaksanakan pengujian mutu benih untuk uji profisiensi, uji banding, pengujian hasil uji petik, pemeliharaan ruang lingkup, dan lain-lain. pelayanan pengujian di Laboratorium Balai Besar PPMBTPH mencakup kegiatan pengujian internal dan eksternal.

Disamping itu, pencapaian ini juga didukung oleh laboratorium Balai Besar PPMBTPH telah terakreditasi baik nasional maupun internasional, yang meliputi:

- a. Laboratorium penguji benih diakreditasi oleh ISTA.
- b. Laboratorium penguji benih diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017.

- c. Laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan ISO/IEC 17043:2010.

Selanjutnya Balai Besar PPMBTPH selalu meningkatkan kompetensi petugas pelaksana pelayanan melalui bimbingan teknis, pelatihan, *inhouse training*, dan lain-lain.

Dalam mendukung pencapaian indikator LHU pengujian mutu benih, Balai Besar PPMBTPH melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain: pelayanan pengujian mutu benih; uji petik mutu benih beredar; penguatan laboratorium penguji mutu benih; laboratorium penyelenggara uji profisiensi; penyelenggaraan uji profisiensi; workshop sistem manajemen mutu; dan bimbingan teknis.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar PPMBTPH mencapai nilai 3,72 atau 111,04% dari target 3,35, dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Pencapaian nilai IKM tahun 2021 ini disebabkan karena pelayanan yang diberikan oleh Balai Besar PPMBTPH tetap dilaksanakan meskipun pada

kondisi pandemi Covid-19 yang melanda, sehingga memberikan tingkat kepuasan yang cukup tinggi bagi pelanggan/costumer. Nilai tertinggi diperoleh dari unsur pelayanan kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, karena dalam menetapkan biaya dalam pengujian mutu benih dan uji profisiensi Balai Besar PPMBTPH mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Pertanian, sementara kegiatan bimbingan teknis, magang, dan lainnya tidak dipungut biaya.

Disamping itu, unsur pelayanan lainnya yang cukup memperoleh apresiasi dari pelanggan mungkin karena dirasakan sangat memuaskan dan memperoleh nilai yang tinggi yaitu kualitas sarana dan prasarana. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Balai Besar PPMBTPH dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik. Balai Besar PPMBTPH juga sedang membangun aplikasi yang mendukung pelayanan publik terutama pelayanan pengujian mutu benih.

Dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, Balai Besar PPMBTPH mengikuti standar pelayanan publik yang ditetapkan oleh Kepala Balai Besar PPMBTPH melalui Keputusan Nomor 666a.KP.430/C.3/9/2021 tentang Standar Pelayanan Publik pada Jenis Pelayanan Pengujian Mutu Benih Laboratorium, Uji Profisiensi, dan Bimbingan Teknis. Meskipun pandemi Covid-19 masih berlangsung, namun Balai Besar PPMBTPH tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Jam layanan tetap seperti biasa, namun dengan mengatur jadwal piket petugas yang melaksanakan pelayanan dan juga dengan memanfaatkan teknologi memberikan pelayanan secara daring.

Dalam mendukung pencapaian indikator IKM atas layanan publik, Balai Besar PPMBTPH melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain: sertifikasi pelayanan publik; fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium; pengelolaan database/website; penerbitan buletin vigor; dan pameran pertanian.

4. Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan terhadap layanan program, anggaran, evaluasi, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga Balai Besar PPMBTPH dengan capaian 3,20 atau 100% dari target, dengan kategori **Berhasil**.

Survei kepuasan pegawai atas layanan internal yang diberikan penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan pegawai dalam lingkungan kerja dari waktu ke waktu. Survei ini digunakan sebagai evaluasi layanan administrasi perkantoran sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan Balai Besar PPMBTPH, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Hasil evaluasi tersebut akan dijadikan dasar dalam mengambil langkah untuk perbaikan layanan internal khususnya pada Bagian Umum.

Setelah dilakukan survei kepada pegawai Balai Besar PPMBTPH atas layanan administrasi, diperoleh tingkat kepuasan pegawai sebesar 3,20 atau 100% dengan kriteria Berhasil. Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, karena merupakan indikator baru dan baru dihitung tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target pada akhir RPJMN

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

2020-2024 sebesar 3,28, capaiannya masih di bawah target yaitu sebesar 97,56%.

Capaian kepuasan pegawai ini menunjukkan bahwa pegawai merasa cukup puas dengan layanan administrasi yang dilaksanakan oleh Bagian Umum. Hal ini juga dibuktikan dengan keluhan pegawai ke Bagian Umum ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Layanan administrasi berusaha memenuhi semua yang dibutuhkan oleh para pegawai, mulai dari penyusunan anggaran, revisi anggaran, terkait kepegawaian seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengisian aplikasi kinerja, pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran kegiatan, usulan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pegawai dan lain sebagainya.

Untuk meningkatkan pelayanan administrasi bagi pegawai Balai Besar PPMBTPH, maka kegiatan yang dilaksanakan antara lain: penyusunan program dan rencana kerja; pengelolaan keuangan dan perlengkapan; pengelolaan kepegawaian dan tata usaha; Sistem Pengendalian Intern; penyusunan laporan; pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran; rehabilitasi gedung dan

halaman kantor; pembayaran gaji dan tunjangan pegawai; dan operasional perkantoran.

B. Serapan Anggaran

Tahun Anggaran 2021 Balai Besar PPMBTPH memperoleh anggaran sebesar Rp18.300.000.000. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun 2021 Kegiatan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih (Akun 1767) tidak ada. Output Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih menjadi salah satu output pada kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan (Akun 4579), termasuk di dalamnya belanja modal. Sementara output layanan internal yang berisi gaji dan operasional perkantoran menjadi output pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan (Akun 1766).

Pada bulan Februari 2021 menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga, maka anggaran Balai Besar PPMB-TPH mengalami penghematan sebesar Rp750.000.000, sehingga menjadi Rp17.550.000.000 (Tujuh belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari belanja pegawai Rp4.308.420.000;

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

belanja barang Rp10.931.227.000; dan belanja modal Rp2.310.353.000.

Pada bulan April 2021, Balai Besar PPMBTPH mendapat tambahan anggaran sebesar Rp2.500.000.000, sehingga anggaran menjadi Rp20.050.000.000 (Dua puluh milyar lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari belanja pegawai Rp4.308.420.000; belanja barang Rp13.431.227.000; dan belanja modal Rp2.310.353.000.

Pada bulan Agustus 2021, Balai Besar PPMBTPH mendapat tambahan anggaran sebesar Rp1.200.420.000 untuk pelaksanaan bimbingan teknis bekerjasama dengan Komisi IV DPR RI. Dengan adanya tambahan ini, pagu anggaran Balai Besar PPMBTPH menjadi sebesar Rp21.250.420.000.

Dari anggaran tersebut terealisasi mencapai Rp20.836.910.679 (98,05%). Realisasi tersebut lebih rendah dibanding realisasi serapan anggaran tahun 2020 yang mencapai 99,10%. Anggaran yang tidak terserap yaitu belanja pegawai sisa gaji, uang makan, dan uang lembur. sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Secara rinci realisasi anggaran per belanja dan per jenis output seperti pada tabel berikut.

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

Tabel 4. Realisasi Anggaran Tahun 2021 Per Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	(%)
1	Pegawai	4.308.420.000	3.900.667.312	97,13
2	Barang	14.631.647.000	14.626.598.917	99,77
3	Modal	2.310.353.000	2.309.644.450	99,52
Jumlah		21.250.420.000	20.836.910.679	98,05

Pada Tahun Anggaran 2021 Balai Besar PPMBTPH memperoleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp375.104.900,-(Tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus empat ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari penerimaan umum hasil dari penjualan peralatan dan mesin (lelang) sebesar Rp186.526.000 dan penerimaan fungsional sebesar Rp188.578.900. Nilai tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 karena terdapat penerimaan umum dari penjualan peralatan dan mesin (lelang) yang seluruhnya telah disetorkan ke kas negara.

BAB III

RENCANA KINERJA 2023

A. Indikator Kinerja

Indikator kinerja tahun 2023 dengan target-target yang harus dicapai Balai Besar PPMBTPH sebagai berikut:

1. Jumlah rekomendasi hasil pengembangan metode pengujian mutu benih dengan target 5 rekomendasi;
2. Jumlah Laporan hasil uji (LHU) pengujian mutu benih dengan target 1.050 LHU;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar PPMBTPH dengan target 3,45;
4. Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan terhadap layanan program, anggaran, evaluasi, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga Balai Besar PPMBTPH dengan target 3,25.

B. Rencana Kegiatan dan Anggaran

Tahun 2022, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melaksanakan tiga program, yaitu: 1) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan yang Berkualitas; 2) Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; dan 3) Dukungan

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

Manajemen. Untuk Balai Besar PPMBTPH melaksana dua program pada dua kegiatan yang tentunya tetap mendukung program dan sasaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Pada kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan terdapat dua Klasifikasi Rincian Output (KRO), yaitu: 1) Koordinasi dengan Rincian Output (RO) Koordinasi, Bimtek, Monev dan pelaporan dan 2) Penelitian dan Pengembangan Purwarupa dengan RO Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih. Sementara pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdapat pada RO Layanan Perkantoran, Layanan Sarana internal (belanja modal), Layanan Perencanaan dan Penganggaran, dan Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

Berdasarkan pagu alokasi Tahun Anggaran 2023, Balai Besar PPMBTPH memperoleh anggaran sebesar Rp22.265.482.000, dengan rincian: koordinasi, bimtek, monev, dan pelaporan Rp2.000.000.000; uji terap metode pengujian benih Rp10.788.252.000; layanan perkantoran Rp7.280.153.000; layanan sarana internal (belanja modal) Rp1.120.797.000; layanan

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

perencanaan dan penganggaran Rp768.600.000; dan layanan pemantauan dan evaluasi Rp307.680.000.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar PPMBTPH untuk mendukung kinerja tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Program Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Kegiatan: Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan

a. Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan

1) Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kegiatan Budidaya Manajemen Tanaman Pangan

Salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pertanian adalah melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk dapat menghasilkan tenaga teknis, tenaga fungsional, pelaku utama pertanian, pelaku usaha pertanian yang andal agar dapat mendukung program pengembangan

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

sistem dan usaha agribisnis yang berdasarkan pada komoditas unggulan.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 Permentan 40/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2020 Tanggal 23 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, mempunyai fungsi memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam melaksanakan program pembangunan pertanian senantiasa

memprioritaskan petani, penyuluh pertanian, petugas POPT serta petugas lapangan sebagai lokomotif, penggerak dan pelopor yang inovatif, kreatif, profesional, mandiri, mampu bersaing, dan berwawasan global, salah satunya melalui Bimbingan Teknis dan Sosialisasi. Kegiatan Bimbingan Teknis Tanaman Pangan akan dilaksanakan di 20 lokasi (kabupaten/kota).

b. Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih

1) Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengujian Mutu Benih

a) Sinkronisasi pemantapan sistem manajemen mutu laboratorium

Dalam rangka menghadapi persaingan global, keberadaan laboratorium penguji benih mempunyai peranan yang strategis dalam hal menjamin mutu hasil pengujian. Jaminan mutu hasil pengujian dapat dilakukan jika laboratorium memiliki personil yang kompeten, metode yang valid, dan peralatan yang terkalibrasi. Untuk

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya suatu standardisasi laboratorium yang mengacu pada pedoman yang diakui baik di tingkat nasional maupun internasional.

Salah satu hal mendasar yang harus dimiliki oleh laboratorium pengujian benih adalah adanya personel yang kompeten baik di bidang teknis maupun manajemen. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya suatu koordinasi dalam melakukan pemahaman dan penerapan unsur-unsur sistem manajemen laboratorium yang efektif dan dapat diintegrasikan dengan persyaratan manajemen mutu sehingga dapat membantu laboratorium dalam menjaga mutu hasil uji dan pelayanan yang baik terhadap pelanggan.

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman dan penerapan mengenai sistem manajemen mutu di

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

laboratorium berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan peserta sebanyak 70 peserta dari BPSBTPH Provinsi se-Indonesia dan laboratorium pengujian benih lingkup Kementerian Pertanian serta swasta.

b) Seminar pengembangan metode

Seminar pengembangan metode dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu:

(1) Seminar proposal pengembangan metode

Dalam rangka melaksanakan pengembangan dan validasi metode yang telah ditetapkan dengan benar dan mencapai tujuan, maka diperlukan penelaahan proposal kegiatan yang telah dibuat. Penelaahan secara menyeluruh baik dari judul, tujuan, prosedur maupun analisa statistik yang akan digunakan,

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

yang dilakukan bersama-sama dengan para ahli/pakar dibidang perbenihan kegiatan pengembangan dan validasi metode dapat berjalan dengan baik dan benar.

(2) Seminar hasil

Hasil kegiatan pengembangan dan validasi metode yang telah diperoleh oleh Balai Besar PPMBTPH perlu dievaluasi untuk merumuskan rekomendasi yang tepat. Rekomendasi tersebut akan digunakan sebagai bahan pembuat kebijakan bagi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, serta dapat diaplikasikan oleh laboratorium penguji benih baik milik pemerintah maupun swasta. Evaluasi tersebut dilakukan bersama-sama dengan narasumber baik dari perguruan tinggi maupun instansi pemerintah, BPSB serta

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

stakeholder yang terkait dengan perbenihan di Indonesia. Dengan adanya rekomendasi yang tepat dibidang pengujian benih, maka diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya penyediaan benih yang bermutu.

(3) Seminar judul pengembangan metode T.A. 2024

Dalam rangka menghasilkan metode yang tepat sasaran maka diperlukan inventarisasi permasalahan, ide maupun inovasi dari berbagai pihak, sehingga diperoleh metode uji yang valid dan inovatif sehingga mampu mengatasi hambatan dan kendala dalam pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

c) Bimbingan Teknis

Dalam pelaksanaan kegiatan pengujian di laboratorium diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

memadai dari segi sumber daya manusia (SDM). Mengingat terbatasnya Pengawas Benih Tanaman (PBT) baik untuk pengawas benih sertifikasi maupun dalam pengujian laboratorium maka kaderisasi pengawas benih tanaman sangat diperlukan. Untuk memahami teknis sertifikasi, pengambilan contoh maupun pengujian di laboratorium khususnya bagi pengawas benih tanaman yang baru maka perlu diadakan peningkatan kompetensi sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi baik di laboratorium maupun di lapangan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu diadakan bimbingan teknis bagi PBT/analisis yaitu dengan kegiatan bimbingan teknis analisis laboratorium.

Didalam melaksanakan tugasnya Aparatur Negara perlu dibekali pengetahuan tentang bidang pekerjaan yang akan dilakukan.

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

Bidang pekerjaan pertanian yang disertai tugas kepada aparatur pemerintah antara lain sarana pertanian, pengolahan hasil pertanian, budidaya pertanian, pemasaran dan distribusi, penerapan Iptek, pelayanan informasi, kepegawaian/keuangan/perengkapan barang dan lain-lain. Sehubungan dengan itu Balai Besar PPMBTPH selalu melakukan pembinaan administrasi dan teknis pertanian dalam rangka peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah sehingga dalam pelayanannya kepada masyarakat dapat memberikan pelayanan yang prima.

Jumlah peserta yang ditargetkan pada bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Balai Besar PPMBTPH tahun 2023 sebanyak 65 orang.

Disamping bimbingan teknis, juga dilaksanakan *Inhouse Training Kesehatan Benih*. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

kompetensi dan menambah wawasan analisis laboratorium Balai Besar PPMBTPH dalam pengujian bakteri terbawa benih perlu dilakukan *inhouse training* tentang pengujian bakteri terbawa benih dengan metode *liquid assay*, *elisa* dan *PCR*.

- d) Pengawasan Tim Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian

Supervisi dan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan utama Kementerian Pertanian dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan pertanian melalui implementasi program dan kegiatan utama peningkatan produksi dan produktivitas komoditas strategis, penerapan teknologi pertanian, kemudahan akses pembiayaan, dan peningkatan ekspor produksi pertanian sehingga dapat mewujudkan

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

kesejahteraan petani dan menopang pembangunan nasional.

Target pembangunan pertanian yang ingin dicapai Kementerian Pertanian sebagai berikut: (1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan; (2) Peningkatan Eskpor Pertanian; (3) Penurunan Losses; (4) Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian; (5) Peningkatan Generasi Muda Pertanian; (6) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian; (7) Pengentasan Daerah Rawan Pangan dan Stunting; (8) Investasi Pertanian; (9) Peningkatan Serapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian; serta (10) Pengawasan/Pengendalian melalui Kostratani.

e) Temu Pelanggan

Kegiatan temu pelanggan akan dilaksanakan sebagai langkah evaluasi kinerja pelayanan di Balai Besar PPMBTPH, agar pelanggan dapat memberi saran, masukkan dan juga

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

kritik terkait pelayanan pengujian sehingga dapat memberikan masukan positif demi kemajuan Balai Besar PPMBTPH dan juga dapat meningkatkan nilai Indeks kepuasan pelanggan.

- f) Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017

Keberadaan laboratorium pengujian benih yang terstandardisasi mempunyai fungsi yang sangat menentukan dalam memberikan pelayanan uji laboratorium untuk mengeluarkan sertifikat hasil uji yang diakui secara nasional maupun internasional. Di Indonesia kompetensi suatu laboratorium pengujian diakui melalui status akreditasi yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Laboratorium tersebut harus mampu menunjukkan penerapan terhadap Persyaratan Umum Kompetensi

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi SNI ISO/IEC 17025:2017.

Status akreditasi diperoleh melalui serangkaian kegiatan yang harus diterapkan oleh laboratorium secara konsisten. Sebagai upaya untuk membantu laboratorium pengujian benih daerah (BPSBTPH) meraih dan mempertahankan status akreditasi Balai Besar PPMBTPH melakukan kegiatan fasilitasi penerapan kerjasama sistem mutu.

g) Pelatihan Peningkatan SDM (Drone)

Pelatihan ini merupakan aplikasi pelatihan UAV memanfaatkan Unit wahana Drone (Drone yang digunakan untuk pengambilan data foto dan video yang bersifat panoramik, dokumentasi dan aerial video) dalam bidang mapping dengan dasar fotogrametri. Pelatihan diselenggarakan mulai dari perencanaan jalur terbang hingga

penampilan hasil orthophoto. Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau lebih dikenal dengan istilah drone sudah banyak digunakan untuk kepentingan pemetaan area yang biasanya susah dijangkau sehingga harus dilakukan dengan Helicopter atau bahkan foto satelit yang memerlukan biaya yang tinggi. Seringkali pemetaan atau pemotretan dengan satelit mungkin terkendala oleh cuaca dan jaraknya yang jauh sehingga menghasilkan cost yang tidak sedikit, Pemetaan menggunakan UAV ini lebih efisien dan efektif. Survey pemetaan menggunakan unit Drone membutuhkan ketepatan pengukuran dan perencanaan awal yang matang untuk menghasilkan data yang baik dan sesuai kaidah fotogrametri, oleh karena itu dibutuhkan pilot yang benar-benar memahami unit drone dan pengukuran fotogrametri.

2) Penerapan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih

a) Pelaksanaan Pengembangan Metode/Validasi/Verifikasi Komoditas Tanaman Pangan

Di bidang Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, salah satu kegiatan yang penting adalah kegiatan pengujian mutu benih. Metode pengujian yang digunakan dalam pengujian mutu benih mengacu pada ISTA Rules. Tidak semua metode yang ada di ISTA Rules dapat dilaksanakan di Indonesia dan banyak permasalahan di bidang pengujian mutu benih yang belum tercantum dalam ISTA Rules, sehingga diperlukan kegiatan pengembangan metode/validasi/verifikasi. Kegiatan pengembangan metode/validasi/verifikasi ini telah dilaksanakan oleh Balai Besar PPMBTPH karena merupakan salah satu tugas pokok. Pengembangan metode/validasi/

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

verifikasi yang akan dilaksanakan sebanyak 10 metode untuk benih tanaman pangan. Tahap awal dari kegiatan pengembangan/validasi/verifikasi metode adalah perumusan judul dan penyusunan proposal.

Pada tahun 2022 telah dilakukan seminar judul untuk kegiatan tahun 2023 yang menjaring masukan dari BPSBTPH, Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Perguruan Tinggi, serta beberapa BPSBTPH menjawab tantangan dan isu terkini dalam rangka mendukung peningkatan produksi tanaman pangan.

b) Pelayanan Pengujian dan Pemeliharaan Ruang Lingkup Laboratorium

Pelayanan pengujian dapat didefinisikan sebagai bentuk layanan jasa dari laboratorium yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Balai Besar PPMBTPH dalam rangka pemenuhan

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

kebutuhan masyarakat Kegiatan pelayanan pengujian di Laboratorium Balai Besar PPMBTPH mencakup kegiatan pengujian internal dan eksternal. Pengujian internal dilakukan untuk mendukung kegiatan uji profisiensi, uji petik mutu benih yang beredar, pemeliharaan ruang lingkup akreditasi serta pemeliharaan kompetensi alat serta analisis, sedangkan pengujian eksternal merupakan permintaan pengujian dari customer (pelanggan).

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016, telah ditetapkan jenis dan tarif PNBP (Penerimaan Negara Buka Pajak) yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan, bahwa jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian diantaranya adalah jasa layanan pengujian, analisis dan pengembangan pertanian. Peraturan Pemerintah ini

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

juga menegaskan, bahwa seluruh penerimaan PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Dengan berdasar Peraturan ini maka Laboratorium Balai Besar PPMBTPH berhak meminta biaya kepada pelanggan eksternal yang nantinya akan disetorkan ke Kas Negara.

Pelayanan pengujian mutu benih yang dilaksanakan mencakup komoditas tanaman pangan dan hortikultura untuk pemeliharaan ruang lingkup, uji profisiensi, uji petik dan uji service, dengan target tahun 2023 sebanyak 1.050 sampel.

c) Uji Petik Mutu Benih Beredar

Pengawasan atau pengendalian mutu benih dilakukan sejak dari proses produksi benih hingga benih tersebut diedarkan di masyarakat. Pengawasan mutu benih bertujuan agar benih yang akan dipergunakan oleh petani terjamin mutunya. Baik itu mutu

genetik, mutu fisiologis maupun mutu fisik. Pengawasan peredaran benih bina dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSBTPH), sedangkan proses sertifikasi benih bina selain diselenggarakan BPSBTPH juga produsen benih bina yang mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu.

Salah satu realisasi bantuan Pemerintah Pusat dalam hal pengawasan peredaran benih bina terutama pada pengawasan hilir, adalah pengawasan benih di pasar melalui pelaksanaan uji petik mutu benih tanaman pangan yang beredar. Kegiatan ini merupakan salah satu fungsi Balai Besar PPMBTPH (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2020).

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui kesesuaian mutu benih dengan persyaratan standar mutu benih sehingga menghasilkan data yang menunjukkan kondisi mutu benih yang beredar di beberapa wilayah di Indonesia dengan target benih padi, jagung, dan kedelai) sebanyak 120 sampel dari 12 provinsi dan 55 sampel untuk koleksi.

d) Buletin Vigor

Sesuai dengan Permentan Nomor 41 Tahun 2020, Balai Besar PPMBTPH mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pengujian mutu benih dan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura. Terkait dengan tugas tersebut, Balai Besar PPMBTPH melaksanakan pengembangan dan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, pelaksanaan uji

profisiensi antar laboratorium pengujian serta pelaksanaan uji petik mutu benih beredar dikarenakan kondisi benih yang beredar di Indonesia sangat beragam tingkat mutunya baik benih yang berasal dari produsen lokal maupun benih impor.

Hasil pengembangan mutu benih tersebut perlu disebarluaskan kepada masyarakat melalui penerbitan buletin dan informasi melalui media cetak yaitu tabloid sinar tani. Buletin vigor juga merupakan wahana terbuka untuk umum untuk menuangkan hasil penelitian, hasil pengembangan metode ataupun hasil kegiatan yang diselenggarakan Balai Besar PPMBTPH terkait pengujian mutu benih.

Diharapkan hasil kegiatan tersebut dapat menambah wawasan/ pengetahuan serta dapat diaplikasikan/dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan dan mengendalikan mutu benih melalui

penyebaran informasi dalam bentuk buletin/majalah.

Target penerbitan majalah/buletin buletin vigor sebanyak dua edisi dan informasi pada media cetak Sinar Tani juga dua edisi dalam satu tahun.

e) Database/website

Balai Besar PPMBTPH sebagai institusi perbenihan yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan pengujian mutu benih TPH. Pada pelaksanaan tugas tersebut, Balai Besar PPMBTPH telah melakukan pengelolaan data benih dengan menggunakan sistem database. Adapun data diperoleh dari benih yang diuji, benih yang harus dimusnahkan dan benih untuk koleksi.

Pengujian mutu benih TPH terdiri dari mutu fisik, fisiologis, genetis dan patologis. Metode pengujian mutu benih yang digunakan dari waktu ke waktu semakin berkembang

mengikuti perkembangan teknologi. Penggunaan berbagai metode tersebut perlu diinformasikan kepada *stakeholder* dan untuk memudahkan dalam penyebaran informasi maka diperlukan suatu media yang mudah untuk diakses. Salah satu media penyebaran informasi tersebut melalui website Balai Besar PPMBTPH sehingga informasi pengembangan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura dan aktivitas Balai Besar PPMBTPH dapat diakses oleh *stakeholder* dengan mudah dan cepat.

f) Pameran

Kegiatan pameran bertujuan untuk menginformasikan dan menyebarkan hasil kegiatan pengembangan dan pengujian mutu benih kepada masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan pameran merupakan salah satu kegiatan yang berguna untuk publikasi dan sarana penyampaian informasi

terkait dengan pengembangan pengujian mutu benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, pengembangan metode pengujian mutu benih, peningkatan kompetensi SDM di bidang pengujian benih dan kegiatan lain yang berkaitan dengan Balai Besar PPMBTPH. Balai Besar PPMBTPH berpartisipasi baik sebagai *info guide* maupun peserta pameran.

g) Pedoman Literatur

Benih bermutu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam produksi pertanian. Mutu benih dapat diketahui melalui pengujian mutu baik di laboratorium maupun di lapang. Pelaksanaan pengujian yang terstandardisasi diperlukan untuk memperoleh suatu data atau hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai standardisasi tersebut melalui pembuatan literatur yang

dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura. Dengan adanya referensi ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi PBT dan analisis benih.

3) Standarisasi Laboratorium Pengujian Mutu Benih

a) Penguatan Laboratorium Penguji Benih

Laboratorium Balai Besar PPMBTPH diakreditasi oleh KAN pada tahun 2003 dengan nomor akreditasi LP-162-IDN dan re-akreditasi pertama pada tahun 2008 dengan masa berlaku 4 (empat) tahun. Pada tahun 2013 laboratorium Balai Besar PPMBTPH telah mendapatkan keputusan re-akreditasi kedua, tahun 2017 re-akreditasi ketiga, dan tahun 2021 re-akreditasi keempat.

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

Dalam rangka menjaga kompetensi dan untuk mempertahankan status akreditasi yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional maka Laboratorium Penguji Balai Besar PPMBTPH melakukan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 baik yang dilaksanakan oleh badan eksternal (KAN) maupun secara internal (oleh Balai Besar PPMBTPH). Penerapan sistem manajemen mutu tersebut dilakukan antara lain melalui kaji ulang dokumen, audit untuk menilai kesesuaian dengan persyaratan, serta kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi kecocokan, kesinambungan dan efektivitas sistem manajemen. Pada tahun 2022 diagendakan Survailen ke-1 sehingga pada tahun 2023 tidak terdapat kegiatan pemeriksaan oleh KAN.

b) Laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi

Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) Balai Besar PPMBTPH merupakan Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) terakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17043:2010 dengan nomor PUP-001-IDN dengan ruang lingkup pengujian kadar air, kemurnian, daya berkecambah dan penetapan berat 1000 butir serta pengujian kesehatan benih (pengujian cendawan terbawa benih).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PUP dalam mempertahankan status akreditasi yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional yaitu menerapkan sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh PUP. Penerapan sistem manajemen mutu dilakukan antara lain melalui kaji ulang dokumen, audit untuk menilai kesesuaian dengan persyaratan, serta kaji ulang manajemen untuk

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

mengevaluasi kecocokan, kesinambungan dan efektifitas sistem manajemen. Pada tahun 2023 ini akan dilakukan juga Survailen ke-2 oleh KAN untuk melihat kelayakan PUP Balai Besar PPMBTPH dalam mempertahankan status akreditasinya.

c) Keanggotaan dalam Organisasi Internasional

Salah satu fungsi Balai Besar PPMBTPH yaitu melaksanakan sertifikasi benih internasional untuk benih tanaman pangan dan hortikultura. Hal ini dapat dilaksanakan apabila Balai Besar PPMBTPH telah terakreditasi oleh International Seed Testing Association (ISTA). Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, pada tahun 2006 Balai Besar PPMBTPH menjadi anggota ISTA dengan nomor IDML 01. Langkah tersebut dilanjutkan dengan pengakuan kompetensi dalam

pengambilan contoh dan pengujian mutu benih melalui status terakreditasi ISTA pada tahun 2010. Tahun 2014, 2017, dan 2021 Balai Besar PPMBTPH memperoleh status re-akreditasi pertama, kedua dan ketiga. Status akreditasi ini diperpanjang melalui audit reakreditasi penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan standard akreditasi ISTA serta partisipasi dalam beberapa putaran uji profisiensi yang diselenggarakan secara rutin oleh ISTA.

Manfaat yang dirasakan oleh Balai Besar PPMBTPH sebagai anggota ISTA maupun terakreditasi ISTA antara lain adanya pengakuan internasional terhadap sertifikat hasil uji mutu benih yang dikeluarkan oleh Laboratorium Balai Besar PPMBTPH untuk tujuan impor dan ekspor (*blue* dan *orange certificate*), mendapatkan bantuan teknis untuk meningkatkan

kapasitas kelembagaan dan sumber daya dalam pengujian mutu benih serta memperoleh informasi terkini yang berkaitan dengan teknologi pengujian mutu benih dan status kompetensi laboratorium di tingkat internasional.

d) Fasilitasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

Di Indonesia untuk menjadi laboratorium pengujian benih yang terstandardisasi harus memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017 dengan menggunakan metode uji berdasarkan ISTA Rules dan sebagai bukti kompetensi yaitu adanya pengakuan dari KAN sebagai laboratorium yang terakreditasi dengan mendapatkan sertifikat sesuai dengan ruang lingkup pengujian. Dalam sistem manajemen mutu, data hasil pengujian yang dapat dipercaya tergantung dari beberapa faktor seperti; kompetensi sumber daya

manusia (SDM), akomodasi dan lingkungan laboratorium, metode pengujian, ketertelusuran pengukuran, penanganan barang yang diuji dan pengambilan contoh benih.

Salah satu fungsi Balai Besar PPMBTPH adalah memberikan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium. Fungsi ini diimplementasikan melalui kegiatan bimbingan atau fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu terhadap laboratorium penguji benih, khususnya laboratorium yang menyelenggarakan tupoksi dalam pengawasan dan sertifikasi benih.

e) Penyelenggaraan Uji Profisiensi

Uji Profisiensi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) untuk melihat unjuk kerja laboratorium penguji benih yang ikut berpartisipasi. Peserta uji profisiensi berasal dari laboratorium penguji benih pemerintah atau swasta

yang telah diakreditasi maupun yang belum terakreditasi oleh KAN. Untuk laboratorium yang telah terakreditasi oleh KAN, kegiatan ini merupakan salah satu penilaian jaminan mutu hasil pengujian yang dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi. Tahun 2021 ditargetkan peserta uji profisiensi sebanyak 39 peserta.

Salah satu tugas Balai Besar PPBM-TPH adalah melaksanakan uji profisiensi, unjuk kerja metode, uji arbitrase dan uji acuan. Balai Besar PPMBTPH sebagai institusi PUP telah terakreditasi oleh KAN pada bulan Agustus 2011 dengan nomor PUP-001-IDN.

Ruang lingkup akreditasi penyelenggaraan uji profisiensi PUP Balai Besar PPMBTPH adalah benih tanaman pangan dan hortikultura, dengan parameter pengujian meliputi penetapan kadar air, analisis kemurnian, daya berkecambah, dan

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

penetapan berat 1000 butir. Setiap tahun dilakukan penyelenggaraan uji profisiensi dengan komoditas benih tanaman pangan dan hortikultura.

f) Sertifikasi Pelayanan Publik

Dalam rangka memastikan, mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, Balai Besar PPMBTPH berusaha mempertahankan akreditasi ISO/SNI 9001:2015.

ISO/SNI 9001:2015 merupakan standar di bidang Sistem Manajemen Mutu (SMM). Suatu instansi yang telah terakreditasi ISO/SNI 9001:2015 tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan dalam hal manajemen penjaminan mutu produk/jasa yang dihasilkan.

Ruang lingkup pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Besar PPMBTPH yaitu: pelayanan pengujian

mutu benih, uji profisiensi, dan bimbingan teknis.

2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

Layanan Perkantoran

a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan negara khususnya dalam pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan perlu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman administrasi keuangan di lingkungan Kementerian Pertanian. Balai Besar PPMBTPH melakukan pembayaran gaji dan tunjangan untuk 49 orang pegawai.

b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Balai Besar PPMBTPH adalah sebagai unit pelaksana pusat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan, namun secara teknis dibina oleh Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan dan Direktorat Perbenihan
Direktorat Jenderal Hortikultura.

Dalam pelaksanaan tugas Balai Besar PPMBTPH terbagi dua, yaitu kegiatan teknis pengujian mutu benih dan kegiatan rutin perkantoran sehari-hari. Bangunan/gedung kantor dan halaman gedung kantor serta barang inventaris lainnya milik negara agar dapat digunakan dengan baik perlu dilakukan pemeliharaan/perawatan. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas perlu dilakukan pemeliharaan/perawatan secara teratur, agar kondisi bangunan kantor/halaman kantor dan barang inventaris lainnya yang berada di Balai Besar PPMBTPH dapat berfungsi dengan baik.

c. Layanan sarana internal

Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar PPMBTPH yang semakin kompleks sehingga mampu memenuhi tuntutan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu didukung sarana yang memadai, seperti pengadaan kendaraan roda 4; perangkat

pengolah data dan komunikasi; peralatan fasilitas perkantoran berupa peralatan laboratorium; pengembangan sistem informasi; dan renovasi atas gedung laboratorium.

d. Pengelolaan Rancangan, Kepegawaian dan Tata Usaha serta Keuangan

1) Perencanaan kegiatan

Perencanaan kegiatan dan anggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari organisasi pemerintah tersebut. Perencanaan merupakan bagian terpenting dalam kegiatan pembangunan, karena dari perencanaan itu proses/kegiatan berjalan sesuai arah yang telah ditentukan.

Output dari perencanaan adalah penganggaran. Dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja merupakan alat ukur

untuk menilai capaian satuan kerja dalam melaksanakan kegiatannya dalam satu tahun anggaran. Penilaian atas pelaksanaan kegiatan berkenaan dilakukan melalui evaluasi kinerja yang didukung oleh standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan penyusunan anggaran sebagai dasar untuk menentukan anggaran untuk tahun yang direncanakan.

2) Pengelolaan kepegawaian dan tata usaha

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha di lingkup Balai Besar PPMBTPH, maka perlu didukung dengan pengelolaan administrasi yang tertib. Budaya kerja merupakan salah satu upaya agar pegawai dapat memahami dan menerapkan pentingnya disiplin dan berkarya sesuai kaidah dan norma-norma budaya bangsa Indonesia dengan cara pemberian motivasi yang tinggi kepada seluruh pegawai. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menginventarisasi data tentang nilai-nilai

budaya kerja yang sudah ada di Balai kemudian mencari tahu sejauh mana penerapan untuk 17 pasang nilai-nilai budaya kerja dilaksanakan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai pada unit kerja yang dipantau, diisi secara langsung oleh pegawai, dilanjutkan pengolahan data dan pembuatan laporan Indeks Penerapan Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja (IPNBK). Sedangkan kegiatan lainnya adalah penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai, dan pembuatan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

3) Pengelolaan keuangan dan perlengkapan

Balai Besar PPMBTPH adalah salah satu entitas akuntansi dari Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan pengelolaan satuan kerja untuk mewujudkan administrasi yang akuntabel, efektif dan efisien untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.

a) Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan proses yang integral dalam pengendalian pengelolaan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sistem ini apabila diterapkan dengan baik dapat memberikan umpan balik sebagai bahan koreksi dan perbaikan dari pimpinan instansi dan unit kerja. Dengan demikian, unit kerja yang sistem pengendaliannya baik akan memiliki rancangan pengendalian yang tepat dan melaksanakan rancangan itu secara efektif dalam seluruh aktivitasnya untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

- b) Laporan bulanan, simonev, LAKIP, SPI dan laporan tahunan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, berwibawa dan bebas KKN menuju pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggaraan negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan-laporan secara intensif

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

dan dilaporkan secara berkala yang meliputi laporan bulanan, Simonev, Laporan Kinerja (LAKIN) dan Laporan Tahunan.

- c) Laporan SAI, SABMN dan pengelolaan keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tertib administrasi maka pengelolaannya harus mengacu pada peraturan yang berlaku dan pedoman administrasi keuangan dilingkungan Kementerian Pertanian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, setiap unit kerja eselon II wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan keadaan barang inventaris milik negara secara berkala dalam bentuk laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar PPMBTPH mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2. Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

No.	Program/Aktivitas/KRO/RO/Komponen/Subkomponen	Target	Anggaran (Rp.)
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			12.788.252.000
	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan		12.788.252.000
I.	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		2.000.000.000
A.	Bimbingan Teknis Tanaman Pangan	20 Paket	2.000.000.000
II.	Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih	10 metode	10.788.252.000
A.	Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengujian Mutu Benih		5.340.727.000
	1 Sinkronisasi penerapan sistem manajemen mutu lab.	70 orang	243.488.000
	2 Seminar pengembangan metode	3 kali	230.375.000
	3 Temu Pelanggan	1 kali	96.400.000
	4 Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017	75 orang	534.370.000
	5 Pelatihan Peningkatan SDM (Drone)	20 orang	60.000.000
	6 Bimbingan Teknis	140 orang	540.895.000
	7 Pengawasan Tim Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian	7 provinsi	3.635.199.000
B.	Melaksanakan Penerapan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih		4.472.997.000
	1 Pelaksanaan pengembangan metode/validasi/verifikasi komoditas tanaman pangan	10 metode	3.207.000.000
	2 Pelayanan Pengujian dan Pemeliharaan Ruang Lingkup Laboratorium	1.050 sampel	163.277.000
	3 Uji Petik Mutu Benih yang Beredar	175 sampel	429.050.000
	4 Buletin Vigor	2 edisi	80.770.000
	5 Database/website	1 laporan	141.750.000
	6 Pameran	2 kali	384.500.000
	7 Pedoman Literatur	1 pedoman	66.650.000

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

No.	Program/Aktivitas/KRO/RO/Komponen/Subkomponen	Target	Anggaran (Rp.)
C.	Melaksanakan Standarisasi Laboratorium Pengujian Mutu Benih		974.528.000
1	Penguatan Laboratorium Penguji Benih	1 sertifikat	64.835.000
2	Laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi	1 sertifikat	60.560.000
3	Keanggotaan dalam Organisasi Internasional	1 sertifikat	209.081.000
4	Fasilitasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium	20 laboratorium	347.452.000
5	Penyelenggaraan Uji Profisiensi	43 peserta	237.950.000
6	Sertifikasi pelayanan publik	1 sertifikat	54.650.000
Program Dukungan Manajemen			9.477.230.000
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan		9.477.230.000
I.	Layanan Dukungan Manajemen Internal		7.280.153.000
A.	Layanan Perkantoran BBPPMBTPH	1 layanan	7.280.153.000
1	Gaji dan tunjangan	686 OB	4.144.931.000
2	Operasional dan pemeliharaan kantor	12 Bulan	3.135.222.000
II.	Layanan Sarana Internal		1.120.797.000
A.	Pengadaan sarana internal BBPPMBTPH		1.120.797.000
1	Pengadaan kendaraan bermotor mendukung uji terap pengembangan/validasi metode pengujian mutu benih	1 Unit	361.000.000
2	Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi mendukung uji terap pengembangan/validasi metode pengujian mutu benih	14 Unit	108.000.000
3	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	8 Unit	410.675.000
4	Pengembangan sistem informasi	1 Pkt	42.872.000
5	Rehabilitasi gedung dan bangunan	130 M2	198.250.000
III.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		768.600.000
A.	Pengelolaan rancangan, tata usaha, dan keuangan BBPPMBTPH		768.600.000
1	Perencanaan kegiatan	1 rancangan	124.600.000
2	Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan	12 bulan	366.925.000
3	Pengelolaan Kepegawaian dan Tata Usaha	12 bulan	277.075.000
IV.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		307.680.000
A.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		307.680.000
1	Sistem Pengendalian Intern	1 laporan	20.400.000
2	Laporan Bulanan, SIMONEV, LAKIP, SPI dan Laporan Tahunan	14 laporan	209.130.000
3	Laporan SAI, SABMN dan Pengelola Keuangan Kegiatan	12 laporan	74.150.000
4	Laporan pengelolaan tata usaha dan kepegawaian	4 laporan	4.000.000
Total			22.265.482.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Besar PPMBTPH Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Renstra Balai Besar PPMBTPH Tahun 2020-2024 beserta revisinya yang mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian.

RKT ini memuat kebijakan, program dan kegiatan sebagai pedoman bagi Balai Besar PPMBTPH dalam penyelenggaraan aktivitas di bidang pengujian mutu benih satu tahun ke depan.

Balai Besar PPMBTPH akan mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam RKT Balai Besar PPMBTPH Tahun 2023 serta diselaraskan dengan RKAK/L Tahun 2023.

Selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Balai Besar PPMBTPH. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKT juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

yang memadai serta kompetensi dan motivasi serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia dengan didukung sistem pengendalian dan evaluasi yang baik.

Disamping itu, RKT ini dapat memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga RKT ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Balai Besar PPMBTPH serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan di bidang pengujian mutu benih.